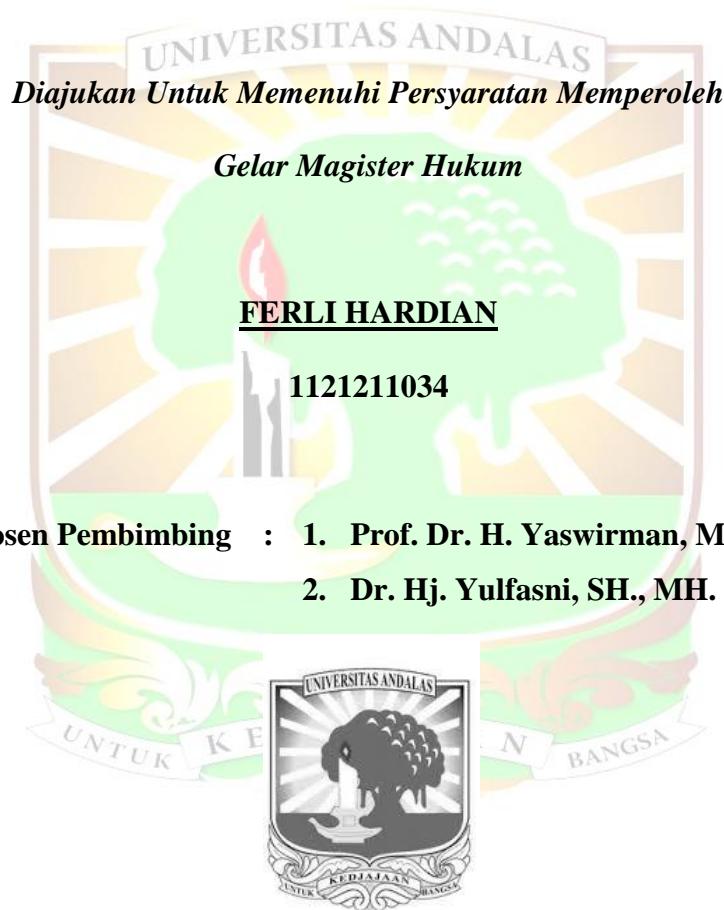


PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN-MUI)
NOMOR 07 / DSN-MUI / IV / 2000 DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
LINKAGE PROGRAM DENGAN POLA EXECUTING ANTARA BANK
UMUM SYARIAH DENGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
SYARIAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG

PADANG



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017

**PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN-MUI)
NOMOR 07 / DSN-MUI / IV / 2000 DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
LINKAGE PROGRAM DENGAN POLA EXECUTING ANTARA BANK
UMUM SYARIAH DENGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
SYARIAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG
PADANG**

ABSTRAK

Linkage Program merupakan kerjasama yang dilaksanakan bank umum kepada lembaga keuangan Mikro dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro dan kecil. Salah satu bank umum syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro (LKM) syariah adalah Bank Muamalat, *Linkage Program* yang dilakukan oleh Bank Muamalat menggunakan pola *executing* yang dijalankan dengan menggunakan tiga skim yakni *mudharabah, murabahah dan ijarah multijasa*. Akad *mudharabah* dilakukan oleh Bank Muamalat dengan lembaga keuangan mikro syariah, sedangkan akad *murabahah* dan *ijarah multijasa* digunakan pada penyaluran pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah kepada nasabah end user. Legalitas syariah dari Akad pembiayaan Mudharabah dalam *linkage program* ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah tentang bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam perjanjian pembiayaan *linkage program* tersebut dan upaya apa yang dilakukan oleh bank dalam rangka penyelesaian pembiayaan *linkage program* yang bermasalah, Dalam penulisan tesis ini pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana penelitiannya menekankan pada permasalahan dengan memperhatikan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penulisan tesis ini tidak hanya melihat kesesuaian Fatwa dengan implementasinya dalam perjanjian, tetapi juga mengenai apakah produk tersebut benar atau tidak menurut ketentuan syariah. Jika ada yang salah, dititik mana letak kesalahan tersebut apakah pada fatwa, implementasi fatwa dalam produk perbankan atau dua-duanya? Dengan demikian, jika memungkinkan adanya perbaikan, maka pada titik itulah perbaikan tersebut seharusnya dilakukan.

Kata Kunci : Penerapan Fatwa, *Linkage Program*, Bank Muamalat Indonesia

THE APPLICATION OF FATWA OF THE NATIONAL SHARIA BOARD (DSN-MUI) NUMBER 07 / DSN-MUI / IV / 2000 IN THE LINKAGE PROGRAM FINANCING AGREEMENT WITH EXECUTING PATTERNS BETWEEN ISLAMIC BANKS AND ISLAMIC MICRO FINANCE INSTITUTIONS (LKMS) IN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk BRANCH OF PADANG

ABSTRACT

Linkage Program is a collaboration implemented by commercial banks to microfinance institutions in the form of financing as an effort to increase small and micro business activities. One of Islamic banks that distributes financing to Islamic microfinance institutions (LKMS) is Muamalat Bank. The Linkage Program, conducted by Muamalat Bank uses executing pattern that is implemented three schemes namely mudharabah, murabaha and multijasa ijara. The mudharabah agreement is executed by Muamalat Bank with LKMS, while murabahah and multijasa ijarah are used to distribute financing from LKMS to its end users. The Islamic legality of Mudharabah financing agreement in this linkage program is based on Fatwa DSN-MUI number 07 / DSN-MUI / IV / 2000 on Mudharabah Financing (Qirad). The problem discussed in this thesis writing is about how the implementation of Fatwa DSN-MUI number 07 / DSN-MUI / IV / 2000 in the linkage program financing agreement and what the efforts that are made by the bank in order to solve the problem bad-debt in the linkage program. In this thesis, the approach of problem used is juridical empirical, where the research emphasizes the problem by observing the enforcement or implementation of normative law provisions in action on any particular legal event occurring within the community. The result of this thesis does not only observe the suitability of fatwa with its implementation in the agreement, but also about whether the products are correct or not according to Islamic provisions. If anything goes wrong, where the fault is, the fatwa itself, or its implementation in the banking product or even both? Thus, if it is possible to improve, then the improvement should be made at that point.

Keywords: Implementation of Fatwa, *Linkage Program*, Bank Muamalat Indonesia